

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN GULAK GALIK KECAMATAN
TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

Anisa Rahma Dini



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN GULAK GALIK KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH:

Anisa Rahma Dini

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan subyek penelitian yaitu penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 336 kepala keluarga dengan sampel yang diambil sebanyak (10%) dari populasi yaitu 34 kepala keluarga. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket sebagai teknik pokok sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penunjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung tahun berdasarkan persepsi masyarakat penerima manfaat program BPNT sudah berjalan efektif hanya perlu ditingkatkan pada indikator ukuran efektivitas program yang masih termasuk kategori cukup efektif agar program dapat berjalan lebih efektif secara keseluruhan. Dengan persentase sebagai berikut: Ketepatan sasaran program 62% atau 21 responden masuk ke dalam kategori efektif, Sosialisasi program 44% atau 15 responden termasuk ke dalam kategori cukup efektif, tujuan program 79% atau 27 responden ada pada kategori efektif, dan pemantauan program 56% atau 19 responden ada pada kategori cukup efektif. Untuk itu agar lebih ditingkatkan lagi efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik dengan seringnya melakukan pembaharuan data penerima manfaat program serta pemberian pelayanan dan penginformasian program lebih maksimal.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pelaksanaan, Program BPNT*

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING PROGRAMS NON CASH FOOD (BPNT) IN KELURAHAN GULAK GALIK TELUK BETUNG UTARA KECAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BY:

Anisa Rahma Dini

The purpose of this study was to find out how effective the implementation of a non-cash food assistance program (BPNT) in the Gulak Galik Subdistrict, Teluk Betung Utara District, Bandar Lampung City. The method used is descriptive with a quantitative approach with research subjects, namely recipients of non-cash food assistance (BPNT) in Gulak Galik Village. The population in this study amounted to 336 family heads with samples taken (10%) from the population, namely 34 heads of families. Data collection techniques in this study were questionnaires as the main technique while interviews and documentation were supporting techniques.

The results showed that the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT) in the Teluk Betung North Gulak Galik Village, Bandar Lampung City based on the perception of the beneficiary of BPNT had been effective only needed to be improved program effectiveness measure indicators that are still categorized as quite effective so that the program can run more effectively as a whole. With the following percentages: The accuracy of the program target 62% or 21 respondents entered the effective category, program socialization 44% or 15 respondents included in the category of effective enough, program objectives 79% or 27 respondents in the effective category, and program monitoring 56% or 19 respondents in the category are quite effective. For this reason, to increase the effectiveness of the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT) in the Gulak Galik Sub-District with frequent updating of program beneficiaries' data and providing program services and information more optimally.

Keywords: Effectiveness, Implementation, BPNT Program

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN GULAK GALIK
KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

Anisa Rahma Dini

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada
Program Studi PPKn
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN GULAK GALIK KECAMATAN TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Anisa Rahma Dini**

No. Pokok Mahasiswa : **1513032014**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Yuniqa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0005058310

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

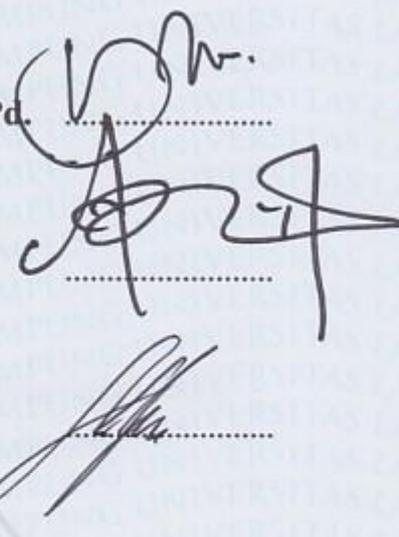
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**

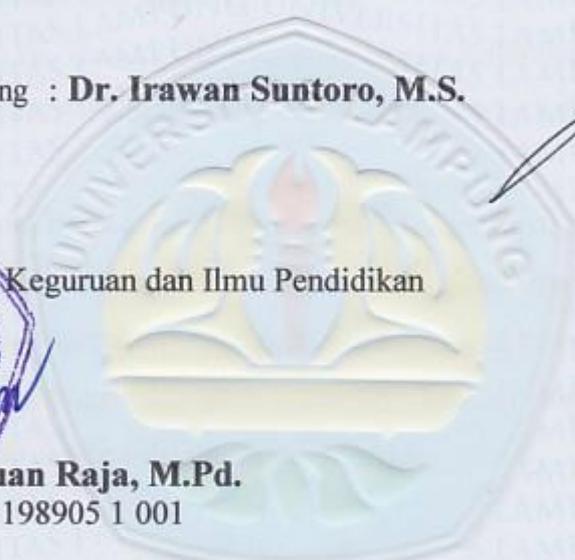
Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Irawan Suntoro, M.S.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Maret 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah:

Nama : Anisa Rahma Dini

NPM : 1513032014

Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Alamat : Jalan Hj. Haniah Gg. Cempaka No.28 Kelurahan Gulak Galik
Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 15 Maret 2019



Anisa Rahma Dini
1513032014

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 13 Januari 1998. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Suryani dan Ibu Nurhasanah.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah:

1. SD Negeri 2 Kelurahan Gulak Galik Kota Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2009.
2. SMP Negeri 17 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2012
3. SMA Negeri 10 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2015

Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS (HIMAPIS) sebagai sekretaris bidang media center pada periode 2017 kemudian Forum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (FORDIKA) sebagai kepala bidang sosial periode 2017. Kemudian penulis mengikuti kegiatan KKN dan PPL di Desa Kotabatu Kecamatan Kota Agung dan Sekolah MAN 1 Tanggamus pada 11 Juli 2018.

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT,
Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda
baktiku kepada:*

*Kedua Orang Tuaku tersayang, Ayahanda Suryani dan
Ibunda Nurhasanah yang telah membesarkanku dengan
penuh cinta kasih sayang, yang murni dan tulus serta
begitu banyak membimbing, memberikan semangat,
motivasi serta selalu mendoakanku demi kesuksesanku*

*Kakak kandungku tersayang satu-satunya Imron
Rosadi yang selalu memberi semangat serta
motivasi dalam menyongsong kesuksesanku*

*Almamater tercinta, Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Lampung*

MOTTO

Untuk membangun Negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun

(Ir. Soekarno)

Berimimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini.

(James Dean)

Keberhasilan yang paling manis adalah ketika kamu mencapai apa yang dikatakan orang lain sebagai sebuah ketidak mungkinan. Kamu tidak akan pernah gagal sampai kamu berhenti untuk mencoba. Jadi libatkankan Allah dalam hidupmu, lakukanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik, maka kamu akan mendapatkan yang terbaik.

(Anisa Rahma Dini)

SANWANCANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahamt, hidayah serta karunia-Nya sehingga setelah melewati proses yang panjang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung”**. Shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar baginda Rasulullah SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak.

Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis banyak memperoleh saran dan kritikan yang membangun sekaligus sebagai sebuah pembelajaran bagi penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing akademik sekaligus sebagai pembimbing I dan Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S selaku pembahas I yang telah memberikan masukan dan arahnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Febra Anjar Kusuma, M.Pd selaku pembahas II yang telah memberikan masukan dan arahnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd, Ibu Devi Sutrisno, S.Pd., M.Pd, Bapak Obby T. Hidayat S.Pd., M.Pd, Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd, Bapak Drs. H. Berchah Pitoewas, M.H, Bunda Dayu Rika Perdana S.Pd., M.Pd., Bapak Rohman S.Pd., M.Pd., serta seluruh

Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, motivasi, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.

10. Teristimewa untuk Ayahku Suryani dan Ibuku Nurhasanah serta kakak kandungku satu-satunya Imron Rosadi. Terima kasih sebesar-besarnya keluarga kecilku yang penuh cinta untuk begitu besarnya cinta dan kasih sayang untukku, doa yang tak pernah putus serta dukungan yang luar biasa baik secara fisik, materil dan emosional, motiviasi dan ketulusan yang selama ini diberikan demi kesuksesanku. Kalian adalah alasan terbesarku untuk segalanya dalam hidupku. Terutama dalam penulisan skripsi terima kasih karena telah dengan ikhlas di tengah kesibukannya membantuku dalam mengumpulkan data dilapangan dalam skripsi ini.
11. Keluarga besarku terima kasih selalu memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesanku.
12. Bapak Eeng Zamhir, S.Sos. selaku Lurah Kelurahan Gulak Galik yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.
13. Ibu Yuli Siti Purwo selaku petugas sosial masyarakat sekaligus yang menangani berbagai bantuan sosial di Kelurahan Gulak Galik telah bersedia memberikan data dan informasi yang menunjang skripsi ini.
14. Terima kasih kepada bapak dan ibu aparaturnya Kelurahan Gulak Galik yang telah membantu memberikan informasi dalam menunjang skripsi ini.

15. Terima kasih untuk seluruh warga penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik yang telah bersedia memberikan keterangan dalam mengisi angket penelitian dan memberikan informasi mengenai penelitian skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat terbaikku yang sudah seperti saudaraku: Linda Puspita, Annisa Suciati, Nadya Pratiwi, Tri Astuti, Latifa Linda, Eva Yulianti dan Revisya. Yang selalu ada untukku sejak menjadi mahasiswa baru prodi PPKn hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk canda, tawa, tangis, bahagia, semangat, dukungan, pengalaman hidup dan meluangkan waktunya dan banyak bantuannya untuk penulis. Kalian terbaik
17. Terima kasih untuk teman terbaikku Ilham Wicaksono yang telah memberikanku dukungan, doa, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuanganku keluarga besar Civic Education 2015 seluruhnya tanpa terkecuali terima kasih telah mewarnai hidup dan memberikan banyak cerita serta pengalaman hidup yang luar biasa. Kalian luar biasa para penghuni lorong J dan gedung D. Semoga setelah kuliah kita usai tidak mengakhiri kebersamaan yang kita miliki.
19. Sahabat-sahabat sepermainan terbaikku yang sudah seperti saudaraku: Putri dan Mariska. Terima kasih untuk selalu menghiburku, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Terima kasih untuk kak Muklas Nurahman, S.Pd. selaku staff prodi PPKn pada masanya, Teman seperjuanganku Rantika Kurniati Ibu Elisa Septriana

S.Pd, Mba Devita Puspa Sari S.Pd., Mba Dian Ayu Mukti, S.Pd, Mba
Monica Pricill., S.Pd mba Ana serta kakak tingkatku angkatan 2013-2014
dan adik angkatan 2016-2018 terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

21. Rekan seperjuangan KKN dan PPL, keluarga KKN di Desa Kotabatu
Kecamatan Kota Agung, dan Sekolah MAN 1 Tanggamus. (Febri
kurniawan, Dwi lestari , Ocha Holida, Donny Aditama , As'ad Rizki,
Sitihardiyanti, Enno, Ichsan). Kalian sungguh luar biasa. Terima kasih untuk
pengalaman hidup yang diberikan, dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
22. Terima kasih untuk keluarga besar HIMAPIS terutama pada periode 2017
dan periode 2016 atas pengalaman luar biasanya, dukungan dan motivasinya
untuk penulis. Kalian luar biasa.
23. Terima kasih untuk keluarga besar FORDIKA terutama pada periode 2017
atas segala bantuannya, pengalaman luar biasa yang diberikan, dukungan
dan motivasi untuk penulis,. Kalian sangat terbaik
24. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah
banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ketulusan dan kebaikan bapak, ibu serta rekan-rekan mendapat balasan
pahala dari Allah SWT. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak terkait. Aamiin.

Bandar Lampung, 28 Januari 2019

Penulis

Anisa Rahma Dini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
SANWANCANA	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis	12
G. Ruang Lingkup Penelitian	13
1. Ruang Lingkup Ilmu	13
2. Ruang Lingkup Subjek	13
3. Ruang Lingkup Objek	13
4. Ruang Lingkup Lokasi	13
5. Ruang Lingkup Waktu	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori	14
1. Tinjauan Tentang Efektivitas	14
a. Pengertian Efektivitas.....	14

b. Ukuran Efektivitas.....	15
c. Teori Kesesuaian Dan Teori Sistem Terbuka.....	20
d. Model Proses Efektivitas.....	22
e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	23
2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial, dan Kemiskinan.....	24
a. Kebijakan Publik	22
1) Pengertian Kebijakan Publik	25
2) Cakupan Kebijakan Publik	26
3) Tipe Kebijakan Publik.....	27
4) Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kebijakan.....	29
5) Tahap-tahap Kebijakan Publik	30
b. Kebijakan Sosial.....	34
c. Kemiskinan.....	37
3. Tinjauan Tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	41
a. Dasar Hukum Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai	46
b. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	47
c. Prinsip Umum Bantuan Pangan Non Tunai	48
d. Kepesertaan dan Sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	49
1) Kepesertaan	49
2) Sasaran	51
e. Besaran Manfaat dan Pagu Bantuan Pangan Non Tunai	52
f. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai	54
1) Persiapan Program	54
2) Persiapan E-warong.....	56
3) Sosialisasi dan Edukasi.....	58
4) Pendaftaran Peserta.....	61
5) Pelaksanaan Pendaftaran Penerima Manfaat	66
6) Penyaluran Bantuan	67
7) Pemanfaatan Bantuan	68
B. Penelitian yang Relevan.....	69
C. Kerangka Pikir	74

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	76
B. Populasi dan Sampel	77
1. Populasi	77
2. Sampel	78
C. Variabel Penelitian	80
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	81
1. Definisi Konseptual.....	81
2. Definisi Operasional.....	82
E. Rencana Pengukuran Variabel	83

F. Teknik Pengumpulan Data.....	84
1. Teknik Pokok.....	84
2. Teknik Penunjang.....	85
G. Uji Kelayakan instrumen	85
1. Uji Validitas.....	85
2. Uji Reliabilitas.....	86
H. Teknik Analisis Data.....	91
I. Langkah-langkah Penelitian	92
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	92
2. Penelitian Pendahuluan.....	93
3. Pengajuan Rencana Penelitian	94
4. Pelaksanaan Penelitian.....	94
a. Persiapan Administrasi	94
b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	94
c. Penelitian Di Lapangan	95

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	96
1. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Gulak Galik	96
2. Struktur Pemerintahan Kelurahan Gulak Galik	97
3. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Gulak Galik.....	98
B. Deskripsi Data	100
1. Pengumpulan Data	100
2. Penyajian Data	101
a. Indikator Ketepatan Sasaran Program	102
b. Indikator Sosialisasi Program.....	107
c. Indikator Tujuan Program.....	112
d. Indikator Pemantauan Program	118
C. Pembahasan	124
1. Indikator Ketepatan Sasaran Program.....	126
2. Indikator Sosialisasi Program	131
3. Indikator Tujuan Program.....	138
4. Indikator Pemantauan Program.....	146

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	151
B. Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA	155
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	158
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Gulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Tahun 2018.....	7
1.2 Jumlah Penerima BPNT di Kelurahan Gulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.....	9
3.1 Jumlah Populasi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung	78
3.2 Jumlah Sampel Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung	79
3.3 Distribusi Skor Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Ganjil (X).....	87
3.4 Distribusi Skor Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Genap (Y)	87
3.5 Tabel Kerja Antara Item Ganjil (X) Dengan Item Genap (Y) Dari Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden	88
3.6 Kriteria Koefisien Reliabilitas	90
4.1 Batas Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung	96
4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Gulak Galik Tahun 2018.....	97

4.3 Daftar Kepala Lingkungan Dan Ketua RT Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Tahun 2018.....	98
4.4 Data Penduduk Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Tahun 2018.....	99
4.5 Data Penduduk Kelurahan Gulak Galik Menurut Agama Tahun 2017	99
4.6 Data Penduduk Kelurahan Gulak Galik Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017	99
4.7 Data Penduduk Kelurahan Gulak Galik Menurut Pekerjaan Tahun 2017	100
4.8 Data Penduduk Kelurahan Gulak Galik Menurut Umur Tahun 2017	100
4.9 Distribusi Skor Angket Indikator Ketepatan Sasaran Program	102
4.10 Distribusi Skor Angket Indikator Sosialisasi Program	107
4.11 Distribusi Skor Angket Indikator Tujuan Program.....	112
4.12 Distribusi Skor Angket Indikator Pemantauan Program	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Kesesuaian Implementasi	20
2.2 Bagan Kerangka Pikir	75
4.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Ketepatan Sasaran Program	105
4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Tujuan Program	109
4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Sosialisasi Program.....	115
4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Pemantauan Program	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rencana Judul Skripsi.....	158
2. Surat Keterangan Judul Skripsi.....	159
3. Surat Keterangan Penelitian Pendahuluan	160
4. Surat Balasan Izin Penelitian Pendahuluan dari Kelurahan Gulak Galik	161
5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi.....	162
6. Keterangan Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	163
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Skripsi.....	164
8. Surat Izin Penelitian	167
9. Surat Balasan Izin Penelitian dari Kelurahan Gulak Galik.....	168
10. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Hasil Skripsi	169
11. Keterangan Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Skripsi	170
12. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Skripsi	171
11. Kisi-kisi Angket	174
12. Angket Penelitian.....	175
13. Wawancara Tertutup.....	181

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada September tahun 2017 penduduk miskin Indonesia berjumlah 26,58 juta jiwa dan Maret tahun 2018 berjumlah 25,95 juta jiwa sedangkan di provinsi Lampung jumlah penduduk miskin September 2017 berjumlah 1.083.740 ribu jiwa naik menjadi 1.097.600 ribu jiwa pada Maret 2018.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial. Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan

peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan bank Negara (Himbara).

Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data

masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya. Namun penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak hanya peserta program keluarga harapan (PKH) saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain- lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik terdapat sistem *Saving account* dan *e-Wallet/dompot* elektronik, sehingga peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Tujuan program bantuan pangan non tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS No.10 Tahun 2017 tentang Program keluarga harapan (PKH) dan PERPRES

RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, serta PERMENSOS No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerima manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Pada awalnya, program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2017) menjelaskan bahwa pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu : Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi

penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

Kedua, indikator tepat jumlah. Masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga 2017, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai. (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2017)) menjelaskan bahwa Program bantuan pangan non tunai (BPNT), pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah Timur. Salah satu kota yang telah menerapkan program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan memiliki jumlah penerima bantuan sosial pada tahap I, sebesar 17.572 peserta. Kemudian, jumlah penerima bantuan sosial mengalami kenaikan pada tahap II hingga tahap IV yaitu sebesar 17.634

peserta. Masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta keluarga penerima manfaat (KPM), selain akan mendapat bantuan sosial dari program bantuan pangan non tunai (BPNT), peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). (Lampungprov.go.id) kementerian Sosial telah menetapkan kota Bandar Lampung sebagai penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 49.711 KPM dengan jumlah e-warong sebanyak 71 kelompok yang tersebar di Bandar Lampung.

Berdasarkan Pasal 3 PERMENSOS Nomor 10 Tahun 2017 tentang keluarga harapan di jelaskan bahwa: Sasaran akses PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian berdasarkan Pasal 5 dijelaskan bahwa komponen kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 meliputi: a. komponen kesehatan 1) ibu hamil/menyusui. 2) anak berumur 0-6 tahun. b. komponen pendidikan 1) anak SD/MI sederajat. 2) anak SMP/MTs sederajat. 3) anak SMA/MA sederajat. 4) anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial 1) lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun. 2) penyandang disabilitas.

Adanya program pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Sehingga diharapkan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dapat berjalan secara efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sehingga evaluasi terhadap

pelaksanaan program perlu dilakukan dengan mengukur efektivitas sebuah program. Efektif atau tidaknya program dapat dilihat dari hasil akhir program yakni sejauhmana tercapainya tujuan program . Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan suatu program dapat dilakukan dengan analisis dengan mengukur efektivitas dengan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada.

Efektivitas dapat tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menafsirkannya. Sehingga penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program yang dapat dianalisis melalui indikator seperti salah satunya sasaran program, tujuan program, sosialisasi program dan lain sebagainya.

Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di berbagai wilayah di Kota Bandar Lampung telah terlaksana dan mulai berjalan salah satunya di lingkungan Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara dengan bekerjasama bersama Bank BRI dan Perum Bolug. Kelurahan Gulak Galik terdiri dari 2 LK dan tiap LK terdiri dari 12 RT, sehingga jumlah RT di Kelurahan Gulak Galik sebanyak 24 RT . Berikut data penduduk Kelurahan Gulak Galik pada Januari 2018:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Tahun 2018

Lokasi	Jumlah RT	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
LK I	12 RT	3848 Jiwa	860 Kepala Keluarga
LK II	12 RT	3689 Jiwa	829 Kepala Keluarga
Jumlah	24 RT	7537 jiwa	1689 Kepala Keluarga

Sumber: Data Sekunder Kelurahan Gulak Galik Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang saya peroleh pada tanggal 2 Oktober 2018 bersama lurah dan petugas administrasi bantuan sosial di Kelurahan Gulak Galik serta beberapa ketua RT Kelurahan Gulak Galik mengatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait penyaluran bantuan pangan non tunai BPNT di Kelurahan Gulak Galik. Beberapa permasalahan seperti masih belum tepat sasaran para penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) padahal penerima BPNT harus memenuhi komponen yang telah ditetapkan oleh PERMENSOS No. 10 Tahun 2017 dan pedoman pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) karena menurut hasil wawancara dengan beberapa ketua RT bahwa permasalahan disebabkan ada beberapa warga ekonomi cukup mampu yang juga turut menerima program bantuan pangan non tunai (BPNT). Selain itu terdapat permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan dana bantuan yang tidak sebagaimana mestinya dengan aturan yang telah ditetapkan terjadi pada warga penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) karena menurut hasil wawancara dengan beberapa ketua RT Kelurahan Gulak Galik beberapa warga memanfaatkan dana bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk membeli rokok padahal dalam aturan pemanfaatannya ditujukan untuk membelanjakan dana bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Selain itu menurut beberapa ketua RT di Kelurahan Gulak Galik terdapat permasalahan terkait kurangnya penerima kuota penerima BPNT di Kelurahan Gulak Galik padahal masih banyak warga Kelurahan Gulak Galik yang termasuk golongan keluarga miskin. Berikut data mengenai jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik:

Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

No	Lokasi RT	Penerima BPNT
1	RT 01	6 KK
2	RT 02	2 KK
3	RT 03	12 KK
4	RT 04	12 KK
5	RT 05	8 KK
6	RT 06	-
7	RT 07	22 KK
8	RT 08	8 KK
9	RT 09	17 KK
10	RT 10	10 KK
11	RT 11	2 KK
12	RT 12	18 KK
13	RT 13	18 KK
14	RT 14	10 KK
15	RT 15	12 KK
16	RT 16	16 KK
17	RT 17	16 KK
18	RT 18	42 KK
19	RT 19	47 KK
20	RT 20	10 KK
21	RT 21	16 KK
22	RT 22	9 KK
23	RT 23	11 KK
24	RT 24	12 KK
	Jumlah	336 KK

Sumber: Data sekunder Kelurahan Gulak Galik

Terkait permasalahan masih kurangnya kuota bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan masih terdapatnya beberapa warga miskin di beberapa lingkungan RT yang tidak termasuk ke dalam penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) kemudian menimbulkan reaksi masyarakat.

Sehingga muncullah cemburu sosial diantara para warga di lingkungan sekitar karena beberapa warga yang semestinya masuk ke dalam komponen penerima namun tidak ditetapkan sebagai penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang menyebabkan ketua RT mengalami cemoohan terkait para

penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tidak tepat sasaran. Selain itu beberapa warga saling memprovokasi satu sama lain akibat tidak terdaftar sebagai penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT).

Berdasarkan data dan fakta uraian di atas maka dapat disimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT) di kelurahan Gulak Galik. Mengingat pentingnya pelaksanaan sebuah program sosial pemerintah dalam upaya memberantas kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat sehingga diperlukan upaya pelaksanaan program yang efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Atas dasar tersebut, maka diperlukan suatu penelitian tentang efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka penduduk miskin di Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
2. Masyarakat penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik masih ada yang tidak tepat sasaran.
3. Bantuan pangan non tunai (BPNT) yang didapatkan oleh masyarakat Kelurahan Gulak Galik belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
4. Kurangnya kuota bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk masyarakat Kelurahan Gulak Galik.

5. Efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang belum termanifestasikan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalahnya pada Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Tahun 2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak-Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memperkaya dan menerapkan konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan politik dan kenegaraan karena berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah untuk melakukan upaya mengefektifkan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) sesuai aturan pemerintah yang telah ditetapkan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan agar kuota penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) semakin ditingkatkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat memiliki pengetahuan yang luas tentang program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dicanangkan pemerintah sehingga mampu berperan aktif dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan baik untuk menjadi masyarakat yang peduli, kritis, serta sadar hukum.

c. Bagi Calon Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Bagi calon guru, penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan bahan ajar mengenai dimensi politik dan kenegaraan agar nantinya dapat disampaikan kepada peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup penerapan ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian politik dan kenegaraan mengenai kebijakan pemerintah karena membahas tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Tahun 2018.

2. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik.

3. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini ialah efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik.

4. Ruang Lingkup Lokasi

Ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini terletak di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 4 Oktober 2018 dengan nomor 6597/UN26.13/PN.01.00/2018 sampai dengan 14 Januari 2019 dengan nomor 205/UN26.13/PN.01.00/2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Tentang Efektivitas

Efektivitas yang berasal dari kata efektif suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Arikunto dalam Jefry (2015: 5) “Efektivitas adalah taraf tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan.” Sedangkan menurut Reinke (1987:52) “Efektivitas adalah penyelesaian dalam kaitannya dengan kebutuhan atau perhatian”. Sedangkan Menurut Steers (1985:46) “Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai semua sasarannya”.

Menurut Salim dalam Molaga (2015: 4) “Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat disintesis efektivitas ialah adanya hasil dari tercapainya sasaran tujuan. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.

Menurut Yuchtman dan Seashore dalam Steers (1985: 6) “Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai”. Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat simpulkan bahwa efektivitas merupakan keadaan yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu target. Efektif atau tidaknya suatu kegiatan dapat dilihat dari hasil akhir suatu kegiatan. Misalnya dalam keberhasilan bantuan pangan non tunai (BPNT), efektif atau tidaknya dapat dilihat dari salah satunya pemanfaatan bantuan dan sasaran bantuan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah aturan program tersebut.

b. Ukuran Efektivitas

Menentukan keefektifitasan dalam sebuah program ataupun kinerja organisasi dapat dijadikan bahan evaluasi. Maka ukuran efektifitas menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Efektifitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menafsirkannya.

Menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017: 3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

a) Ketepatan Sasaran Program

Pemahaman program dalam hal ini sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuaian antara tujuan program dan sasaran peserta program mempengaruhi keberhasilan program.

b) Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditunjukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Sosialisasi program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana *stakeholder* atau pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya mengetahui, memahami dan memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada masyarakat terkait program bantuan pangan non tunai.

c) Tujuan Program

Tujuan program yaitu, sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

d) Pemantauan Program

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam hal ini pemantauan program berupa evaluasi yang dapat di ukur dengan sejauh mana suatu program memberikan efek atau dampak terhadap perubahan yang nyata bagi masyarakat peserta program serta pelaksanaan program harus sesuai dengan waktu dan tujuannya.

Kemudian, Menurut Steers (1985: 53) menjelaskan bahwa terdapat 3 indikator dalam pengukuran efektivitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti jangka waktu yang dibutuhkan. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 3 indikator yaitu, kurun waktu, sasaran dan dasar hukum yang merupakan target

kongkret dalam mencapai efektivitas suatu program atau kegiatan sebab efektivitas sebuah program dapat dilihat dari hasil akhir program.

b) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk dapat mengadakan sosialisasi, komunikasi dan sebagai pengembangan konsensus. Akan tetapi pada intinya, integrasi lebih menekankan kepada proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan penyampaian informasi mengenai suatu program atau organisasi kegiatan agar program atau organisasi kegiatan yang akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan program atau organisasi kegiatan.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan penerapannya di lapangan dan sarana-prasarana yang memadai.

Selanjutnya, terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengukur suatu efektivitas yaitu menurut Sutrisno Hadi dalam Jannah (2016: 4) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :

- a) Pemahaman program : dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program. Pemahaman program oleh masyarakat meliputi mekanisme pelaksanaan program, pemanfaatan program, informasi program baik secara umum maupun khusus.

- b) Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan. Selain itu sejauh mana program sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peserta program harus memiliki kesesuaian dengan apa yang ditawarkan program.
- c) Tepat waktu : dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- d) Tercapainya tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
- e) Perubahan nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran mengenai keseluruhan proses dan hasil dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan, yang dapat memaparkan capaian dari tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai ukuran keberhasilan dan evaluasi suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017: 3) yang dimana ukuran efektivitas dalam suatu organisasi dapat diukur menggunakan 4 (empat) variabel yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program serta pemantauan program.

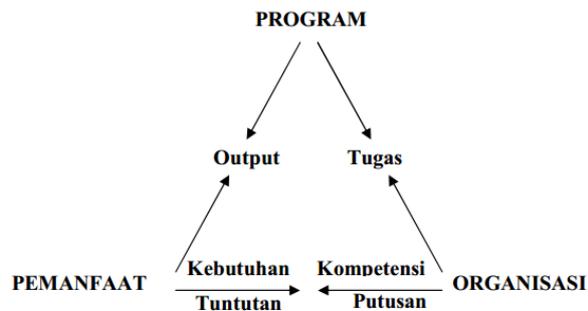
c. Teori Kesesuaian dan Teori Sistem Terbuka

Efektivitas suatu program atau organisasi dalam pencapaiannya memiliki konsep dalam pelaksanaannya tersebut. Program atau organisasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan.

1. Teori Kesesuaian

Dalam teori ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan program yang baik, maka efektivitas program akan dapat tercapai. Model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

Gambar 2.1 Model Kesesuaian Implementasi



Sumber: Haedar dan Tarigan dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017: 4).

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat atau jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu kesesuaian antara tiga unsur ini mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Haedar dan Tarigan dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017: 4).

2. Teori Sistem Terbuka

Sistem terbuka dirumuskan sebagai “suatu kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya” Von Bertalanvy dalam Steers (1985:11).

Menurut Steers (1985:12) pengertian umum mengenai sistem terbuka: mencakup tiga komponen dasar yaitu: (1) Masukan, (2) Pengolahan, dan (3) Keluaran. Masukan mewakili semua faktor yang “ditanamkan” dalam sebuah organisasi oleh lingkungan *ekstern*. Masukan ini kemudian diubah (diolah) menjadi bermacam-macam keluaran yang

dikembalikan kepada lingkungan. Jadi suatu sistem terlihat terus-menerus saling mempengaruhi dengan lingkungannya dalam hubungan tukar-menukar yang beraneka ragam.

Tekanan terus-menerus diberikan pada saling-hubungan dinamis diantara berbagai macam komponen dari sebuah sistem. Bukan saja sebagian besar komponen mempunyai hubungan dengan, dan terpengaruh oleh, komponen-komponen lain dalam sistem tersebut, tetapi disamping itu sifat yang tepat dari hubungan demikian dapat diharapkan berubah dalam perjalanan waktu sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungannya, hal ini termasuk meninjau suatu efektivitas organisasi atau program.

d. Model Proses Efektivitas

Model ini menekankan proses-proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas. Menurut Steers (1985: 207) terdapat tiga dimensi utama dari model ini adalah:

1. Konsep Optimisasi Tujuan

Optimisasi Tujuan adalah sarana pengimbang berbagai tujuan yang bertentangan, sehingga setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber-daya selaras dengan tingkat kepentingannya bagi organisasi. Dikemukakan disini, bahwa efektivitas harus dinilai terhadap tujuan yang bisa dilaksanakan ini, bukan terhadap konsep tujuan yang maksimum.

2. Perspektif Sistem

Penggunaan perspektif sistem menekankan pentingnya arti interaksi

organisasi lingkungan. Perspektif sistem ini memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun luar organisasi sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.

3. Tekanan Pada Perilaku

Tekanan pada pengertian mengenai peranan perilaku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Menurut Steers (1985: 209) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

1. Karakteristik Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi (seperti inovasi program dan sebagainya), ukuran (seperti produktivitas, kepuasan kerja dan sebagainya), sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi (seperti pelayanan, efisiensi dalam operasi, pengejaran tujuan dan sebagainya).

Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun mungkin tidak langsung. Bukti-bukti menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi.

2. Karakteristik Lingkungan

Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi. Pertama, lingkungan luar, yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada diluar organisasi (misalnya kondisi ekonomi, dan seterusnya). Kedua, lingkungan dalam, yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan kultural dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan kearah tujuan atau bisa disebut “Iklim organisasi”.

3. Karakteristik Pekerja

Faktor pengaruh yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Para pekerja merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan. Kesadaran akan sifat perbedaan pribadi yang terdapat diantara para pekerja sangat penting dalam mencapai usaha yang diarahkan ke tujuan.

4. Karakteristik Praktek Dan Kebijakan Manajemen

Terdapat beberapa mekanisme dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi dan inovasi.

2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik, Kebijakan Sosial dan Kemiskinan

a. Kebijakan Publik

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi

mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong (proyeksi) mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Sebab sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Menurut Irianto dalam Sari (2017: 4) “Kebijakan disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan”

Penetapan tujuan merupakan langkah utama dalam sebuah proses lingkaran pembuat kebijakan. Penetapan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting karena hanya tujuanlah yang dapat memberikan arah dan alasan kepada pilihan-pilihan publik. Menurut Bridgeman dan Davis dalam Suharto (2008: 5) “Kebijakan adalah *“a means to an end”*, alat untuk mencapai tujuan”.

1) Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2000: 132) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah

Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Lain halnya Dunn, Dye dalam Wibawa (2011: 2) mendefinisikan

“Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Menurut Stone dalam Wibawa (2011:8) “Kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kemudian,

menurut Andreson (Wibawa, 2011: 2) “Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa actor guna mengatasi suatu masalah”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disintesis bahwa kebijakan publik adalah keputusan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan lingkungannya berdasarkan tujuan tertentu.

Menurut Birdgeman dan Davis dalam Suharto (2008: 5) “Kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah”. Kemudian Menurut Carl Friedrich dalam Wibawa (2011: 8) mendefinisikan bahwa:

Kebijakan publik adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik ialah keputusan untuk bertindak berupa kegiatan yang diusulkan dan dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan dalam lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Cakupan Kebijakan Publik

Menurut Bridgeman dan Davis dalam Suharto (2008: 8) Kebijakan

kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap isu atau masalah politik. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik mencakup:

- a. Tujuan. Kebijakan publik senantiasa menyangkut pencapaian tujuan pemerintah melalui penerapan sumber-sumber publik.
- b. Keputusan. Pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian konsekuensi-konsekuensinya.
- c. Struktur. Terstruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya yang jelas dan terukur.
- d. Tindakan. Tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan pemilihan program-program prioritas lembaga eksekutif.

3) Tipe Kebijakan Publik

Menurut Surbakti (1999: 193) terdapat empat tipe kebijakan yaitu regulatif, redistributif, distributif, dan konstituen.

1. Kebijakan Regulatif

Terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya kebijakan regulatif dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan suatu tindakan yang tak diperbolehkan, seperti undang-undang hukum pidana, undang-undang anti monopoli dan kompetisi yang tidak sehat, dan berbagai ketentuan yang menyangkut keselamatan umum. Selain itu, kebijakan regulatif dibuat untuk memaksakan agar individu melakukan suatu tindakan hingga kepentingan umum tidak terganggu seperti berbagai bentuk perizinan dalam menggunakan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public goods*).

2. Kebijakan Redistributif

Ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga Negara tetapi penerapannya melalui lingkungan. Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan redistributif. Hasil penerapan undang-undang pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak bumi dan bangunan, pajak atas keuntungan dan bunga tabungan, dan iuran listrik, yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit merupakan contoh kebijakan redistributif.

3. Kebijakan Distributif

Ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan pengenaan paksaan fisik sangat jauh), tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun tidak dikenakan paksaan kepada individu untuk menggunakannya. Dalam pengertian yang lebih konkret kebijakan distributif berarti penggunaan anggaran belanja Negara atau daerah untuk memberikan manfaat secara langsung kepada individu, seperti pendidikan dasar yang bebas biaya, subsidi kepada sekolah lanjutan dan perguruan tinggi negeri, subsidi energi bahan bakar minyak, subsidi sarana produksi pertanian, pelayanan kesehatan, fasilitas jalan raya, dan pemberian hak paten kepada individu yang berhasil menemukan sesuatu yang baru.

4. Kebijakan Konstituen

Ditandai dengan kemungkinan penerapan paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Walaupun tipe keempat ini merupakan konsekuensi logis dari ketiga tipe kebijakan sebelumnya, sebenarnya tipe ini merupakan kategori sisa (*residualcategory*) yang mencakup tipe-tipe lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam ketiga tipe sebelumnya. Kebijakan konstituen mencakup dua lingkup bidang garapan, yaitu urusan keamanan nasional dan luar negeri, dan berbagai dinas pelayanan administrasi.

4) Faktor Yang Mempengaruhi Proses Kebijakan Publik

Menurut Surbakti (1999: 194) secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses kebijakan, yaitu lingkungan, persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan, dan aktivitas masyarakat perihal kebijakan:

1. Lingkungan

Lingkungan dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama lingkungan umum diluar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai seperti pola pengangguran, pola-pola partisipasi politik, dan urbanisasi. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti struktural. Ketiga, lingkungan khusus dari kebijakan tertentu. Suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat sebelumnya.

2. Persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan

Persepsi pembuat kebijakan yang akurat maupun yang tidak akurat atas lingkungan-lingkungan itu, termasuk atas berbagai peristiwa dan kecenderungan yang terjadi di dalam pemerintahan maupun luar pemerintah, juga ikut mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat karena elit akan bertindak atas persepsi sendiri.

3. Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan

Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan meliputi dua hal. Pertama, sejumlah aktivitas dan proses yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan yang menyangkut *intern* pemerintah maupun yang menyangkut masyarakat umum. Kedua, pelaksanaan kebijakan yang menyangkut upaya-upaya penyediaan sumberdaya bagi pelaksanaan kebijakan, membuat peraturan, petunjuk pelaksanaan, menyusun rencana detail kegiatan, pengorganisasian pelaksanaan, dan memberikan pelayanan kemanfaatan.

4. Aktivitas masyarakat yang menyangkut kebijakan

Aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan yaitu: Pertama, pemanfaatan kebijakan oleh masyarakat dalam arti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja yang memetik manfaat dari kebijakan. Kedua, hasil program atau kebijakan dalam arti dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat dan mengapa berdampak demikian.

5) Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap ialah seperangkat kegiatan yang melahirkan suatu produk yang dapat diidentifikasi yang memiliki awal dan akhir. Setiap tahap terdiri atas

sejumlah kegiatan yang menghasilkan suatu produk, dan setiap produk mempengaruhi tahap berikutnya sampai pada tahap akhir.

Menurut Wibawa (2011: 5) “Tahap-tahap dari suatu kebijakan yaitu dimulai dari perumusan masalah, indentifikasi alternatif solusi, penilaian alternatif, seleksi alternatif, implemetasi kebijakan dan kembali pada perumusan masalah”. Kemudian Menurut R. Rose dalam Wibawa (2011:

6) tahap-tahap dalam proses kebijakan yaitu:

- a. Pengakuan publik akan perlunya sebuah kebijakn (isu).
- b. Isu masuk agenda kontroversi publik.
- c. Masuknya/diajukannya tuntutan/permintah.
- d. Terlibatnya pemerintah.
- e. Dikerahkannya sumberdaya dan disingkirkannya (diciptakannya) rintangan.
- f. Keputusan kebijakan (*policy decisions*).
- g. Implementasi.
- h. *Output*.
- i. Evaluasi.
- j. Umpan balik (*feedback*).

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn dalam Wibawa (2011: 6) tahap-tahap kebijakan meliputi:

- a. Memutuskan untuk memutuskan (pencarian isu dan penentuan agenda).
- b. Memutuskan cara bagaimana memutuskan

- c. Mendefinisikan isu.
- d. Meramalkan, memperkirakan, *forecasting*.
- e. Menentukan tujuan dan prioritas.
- f. Analisis opsi.
- g. Implementasi kebijakan.
- h. Evaluasi dan *review*.
- i. Pemeliharaan kebijakan, penggantian, dan penghentian.

Kemudian Surbakti (1999: 197) mengemukakan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap yaitu politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda), perumusan, pengesahan tujuan dan program, pelaksanaan program, dan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program :

a. Politisasi suatu permasalahan

Politisasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah atau kalangan masyarakat seperti individu atau kelompok. Apabila upaya itu berasal dari masyarakat maka ia akan berwujud imbauan atau tuntutan agar pemerintah menaruh perhatian yang seksama terhadap permasalahan yang menjadi kepentingannya. Apabila upaya datang dari pemerintah maka ia akan berwujud pernyataan tentang tekad pemerintah untuk menangani permasalahan tertentu. Dengan demikian, banyak permasalahan dan kepentingan yang “dipolitikan” (dimasyarakatkan) dan bersaing untuk mendapatkan perhatian pemerintah maka pernyataan pemerintah tersebut sebenarnya juga merupakan suatu keputusan atau pilihan

permasalahan yang hendak digarap. Tujuan permasyarakatan ini juga untuk mendapatkan dukungan dan saran-saran kongkret mengenai program-program yang akan dirumuskan.

b. Pengesahan tujuan dan program.

Ketika suatu agenda digarap secara detail maka kegiatan-kegiatan yang merupakan tahap perumusan dan pengesahan harus dilakukan.

Pernyataan kebijakan (yang biasaya berisi tujuan yang hendak dicapai) program-program kongkret yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila kesepakatan dicapai dengan kompromi maka tujuan dan program-program itu dirumuskan secara umum dan abstrak.

Makin kongkret dan spesifik suatu tujuan dan program maka makin sukar dicapai kesepakatan. Sebaliknya, apabila kesepakatan itu dicapai dengan suara bulat maka tujuan dan program akan dirumuskan secara kongkret dan spesifik.

c. Pelaksanaan program.

Apabila tujuan dan program-program kebijakan dirumuskan dan disahkan sebagai keputusan politik maka tibalah tahap pelaksanaan kebijakan. Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kegiatan.

Pertama, menyediakan sumberdaya (anggaran, personil, dan sarana) bagi pelaksana kebijakan. Kedua, melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Ketiga, menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situsi dan anggaran.

Keempat, pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran, dan

sarana materil lainnya. Kelima, memberikan manfaat kepada dan/atau penguasaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu dan masyarakat pada umumnya.

d. Pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan program atau kebijakan.

Tahap terakhir dari proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk secepat mungkin memperbaiki setiap kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan sehingga tujuan kebijakan atau program dapat dicapai. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan biasanya dilakukan setelah kebijakan selesai dilaksanakan. Evaluasi diarahkan pada kegiatan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan (manfaat dan dampaknya).

b. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Suharto (2008: 11) menyatakan bahwa: “kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya”. Sebagai kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (*developmental*).

Hal ini selaras dengan yang dinyatakan Suharto (2008: 11) menyatakan bahwa:

Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah

sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yakni para pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahguna narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial (Suharto, 2008: 12). Menurut Midgley dalam Suharto (2008: 11) “Kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan”.

Salah satu kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Suharto (2008: 14) jenis dan cakupan pelayanan sosial ialah :

1. Jaminan sosial (*social security*)

Jaminan sosial adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Jaminan sosial umumnya menyangkut asuransi sosial berupa pemberian premi, asuransi kesehatan, pensiun, asuransi kecelakaan kerja. Selain menyangkut asuransi sosial, jaminan sosial juga berupa bantuan sosial (*social assistance*) yakni bantuan uang atau barang jasa yang diberikan kepada

kelompok miskin, anak terlantar, jompo terlantar, penyandang cacat yang tidak mampu bekerja dan sebagainya. Jaminan sosial merupakan perangkat Negara yang di desain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Perumahan

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Negara memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan perumahan bagi warganya, khususnya mereka yang tergolong kurang mampu. Pelayanan perumahan biasanya berupa penyediaan Rusunawa atau RSS, rumah sewa dewan kota yang relatif murah, pemberian subsidi perumahan dan sebagainya.

3. Kesehatan

Pelayanan kesehatan ialah faktor penentu kesejahteraan sosial. Pelayanan kesehatan sebagian besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Peran pemerintah dalam kesehatan ialah penyediaan rumah sakit, pusat-pusat kesehatan, dan para medis yang siap membantu. Selain itu termasuk penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta.

4. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negeri atau swasta maupun lembaga-lembaga non-formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan

infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial, salah satunya untuk mencapai tujuan sosial dalam arti luas yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan.

5. Pelayanan Sosial Personal

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang kebijakan sosial yang merujuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis yaitu: Perawatan Anak, Perawatan Masyarakat, dan Peradilan Kriminal.

c. **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari hadirnya persoalan kemiskina di masyarakat. Kemiskinan dikatakan sebagai akar dari masalah sosial.

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 dipaparkan bahwa “Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunya sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”.

Menurut Zastrow dalam Suharto (2008: 73) terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk mengartikan kemiskinan yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Menurut pendekatan absolut, peran sejumlah barang dan jasa sangat penting dalam menentukan kesejahteraan individu atau keluarga. Definisi kemiskinan didasarkan pada cukup tidaknya jumlah uang yang diperoleh. Berdasarkan garis kemiskinan ini, orang miskin kemudian didefinisikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi sejumlah minimum kebutuhan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Pendekatan relatif menekankan bahwa seseorang dikatakan sebagai miskin bila pendapatannya berada dibawah pendapatan masyarakat rata-rata. Menurut pendekatan ini kemiskinan disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya atau antara suatu waktu dengan waktu lainnya.

Selain terdapat pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan, terdapat juga Teori Kemiskinan yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Menurut Zastrow dalam Suharto (2008: 75) ada empat teori kemiskinan yaitu:

1. Teori Budaya Kemiskinan

Oscar Lewis sebagai tokoh yang mengembangkan teori budaya kemiskinan menjelaskan bahwa kelompok miskin menjadi miskin karena gaya hidup mereka dipengaruhi oleh budaya tertentu. Menurut Lewis, individu yang dibesarkan dalam budaya kemiskinan memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Mereka menjadi tergantung, merasa lebih rendah dari yang lain serta enggan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Teori budaya kemiskinan sangat controversial dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satunya Eleanor Leacock beranggapan bahwa budaya miskin bukan penyebab kemiskinan melainkan akibat dari kemiskinan yang terjadi terus-menerus. Selain itu kritik juga datang dari William Ryan yang menyatakan bahwa Teori Budaya Kemiskinan hanya merupakan bentuk klasik konsep 'menyalahkan korban'. Ryan menyatakan bahwa yang patut disalahkan adalah sistem sosial yang memberikan kesempatan bagi munculnya kemiskinan.

2. Teori Fungsionalis

Teori fungsionalis memandang bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidakberfungsian ekonomi. Teori ini juga mencatat bahwa sistem kesejahteraan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan memiliki beberapa efek samping dalam kemiskinan. Selain itu masalah mengenai kurangnya sistem informasi yang menginformasikan kelompok miskin tentang hak mereka menjadi salah satu sebab terjadinya kemiskinan dalam teori ini.

3. Teori Konflik

Teori ini memandang bahwa masyarakat modern memiliki begitu banyak kemakmuran. Karenanya, kemiskinan ada karena struktur kekuatan menginginkannya untuk ada. Seperti halnya teori fungsional, teori ini tidak memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang berguna atau penting. Melainkan, kemiskinan dipandang sebagai akibat adanya beberapa kelompok merasa diuntungkan, sementara kelompok lainnya dirugikan.

4. Teori Interkasionis

Penganut teori interaksionis memandang kemiskinan sebagai masalah pembagian harapan. Kelompok miskin memperoleh penilaian negatif dari kelompok berpengaruh. Mereka yang menjadi objek *labeling* tersebut akan mencap dirinya negatif dari mulai berlaku sama dengan harapan orang lain terhadap mereka. Kelompok ini percaya bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah konsep diri seorang individu. Mirip dengan pendekatan relatif, interaksionis memandang sifat dasar kemiskinan sebagai sesuatu yang relatif, tergantung pada subjek perbandingannya. Interkasionis mendesak agar stigma dan pandangan negatif yang dihubungkan dengan kemiskinan segera dihilangkan.

Kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 disebutkan hak-hak dan bentuk penanganan fakir miskin oleh pemerintah yaitu:

Fakir miskin berhak:

- a. Memperoleh kecukupan sandang, pangan dan perumahan.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial, dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya.
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.

- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk yaitu:

- a. Pengembangan potensi diri.
- b. Bantuan pangan dan sandang.
- c. Penyediaan pelayanan perumahan.
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan.
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan.
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.
- g. Bantuan hukum; dan/atau
- h. Pelayanan sosial.

3. Tinjauan Tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan sosial dari pemerintah. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah program bantuan pangan non tunai (BPNT) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Presiden Republik Indonesia pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016 memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden no. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut dilaksanakan melalui penyaluran program bantuan sosial secara nontunai kepada para penerima bantuan.

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank Himbara. Di dalam kartu keluarga sejahtera (KKS) elektronik tersebut, terdapat sistem *Saving account dan e-Wallet*/dompet elektronik, sehingga peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli

bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Berdasarkan Permensos No. 10 Tahun 2017 dan Permensos No. 25 Tahun 2016 Bantuan pangan non tunai merupakan bantuan dari program pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan bank negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Tujuan program bantuan pangan non tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS No.10 Tahun 2017 tentang Program keluarga harapan (PKH) dan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, serta PERMENSOS No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Eletronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Pemerintah terus berupaya memperbaiki berbagai program bantuan yang diberikan agar dapat tepat sasaran, efektif dan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Beberapa program bantuan pemerintah seperti bantuan langsung pemerintah, bantuan beras untuk rakyat miskin, bantuan beras untuk kesejahteraan rakyat, bantuan pangan secara non tunai, dan subsidi input pertanian diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rachman, 2018:3).

Bantuan dalam bentuk program seperti halnya beras sejahtera (Rastra) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk masyarakat penerima diberikan dengan harga yang disubsidi. Menurut Suparmoko dalam Rachman (2018:3) “Subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah”.

Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*). Jika dilihat dari efektifitas penggunaan biaya, maka program *cash transfer* lebih baik dibandingkan dengan *in-kind transfer*. Currie and Gahvari dalam Rachman (2018: 3).

Implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) telah diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden. Pedoman pelaksanaan ini juga digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai, e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan Pasal 3 PERMENSOS Nomor 10 Tahun 2017 tentang keluarga harapan di jelaskan bahwa: Sasaran akses PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kemudian berdasarkan Pasal 5 dijelaskan bahwa komponen kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 meliputi: a. komponen kesehatan 1) ibu hamil/menyusui 2) anak berumur 0-6 tahun b. komponen pendidikan 1) anak SD/MI sederajat 2) anak SMP/MTs sederajat 3) anak SMA/MA sederajat 4) anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial 1) lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun 2) penyandang disabilitas.

(Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2017) menjelaskan bahwa Program bantuan pangan non tunai (BPNT), pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Indonesia yaitu

berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun. Salah satu kota yang telah menerapkan program BPNT adalah Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan program BPNT mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan memiliki jumlah penerima bantuan sosial pada tahap I, sebesar 17.572 peserta. Kemudian, jumlah penerima bantuan sosial mengalami kenaikan pada tahap II hingga tahap IV yaitu sebesar 17.634 peserta. Masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta keluarga penerima manfaat (KPM), selain akan mendapat bantuan sosial dari program bantuan pangan non tunai (BPNT), peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). (Lampungprov.go.id) Kementerian Sosial telah menetapkan Kota Bandar Lampung sebagai penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 49.711 KPM.

a. Dasar Hukum Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. UU No.25/Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. UU No.13/Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. UU No.18/Tahun 2012 tentang Pangan.
4. UU No.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Perpres No.82/Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
6. Perpres No.63/Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT).
7. Arahannya Presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, 19 Juli 2017.

b. Tujuan dan Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden.

1. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:
 - a) Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
 - b) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
 - c) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
 - d) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
 - e) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - b) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

- c) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).
- d) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- e) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

c. Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden. Prinsip umum Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi.
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat (KPM).
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

d. Kepesertaan Dan Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1) Kepesertaan

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden kepesertaan dalam Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

a. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penerima manfaat bantuan pangan non tunai adalah Keluarga yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT). Pada Tahun 2017 keluarga penerima manfaat (KPM) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

b. Sumber Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sumber data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan nontunai (BPNT) adalah data terpadu program penanganan fakir miskin, Selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu di tahun 2015.

c. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM)

DT-PFM dikelola dikelola oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin, selanjutnya disebut Pokja Data yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016

tanggal 21 September 2016. Pokja data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pusat Statistika (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

- d. Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017
Daftar Penerima Manfaat (DPM) bantuan pangan non tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial. Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai 2017 adalah keluarga yang namanya termasuk di dalam daftar penerima manfaat (DPM).
- e. Data Penerima Manfaat (DPM) Diserahkan Kepada Bank Penyalur Dan Pemerintah Daerah Oleh Kementerian Sosial.
Bank penyalur kemudian membukakan rumah rekening berdasarkan data penerima manfaat (DPM). Rumah rekening akan menjadi akun elektronik bantuan pangan setelah proses pendaftaran peserta selesai. Apabila keluarga penerima manfaat (KPM) yang namanya terdaftar di data penerima manfaat (DPM) telah memiliki rekening untuk penyaluran program bantuan sosial lain, maka rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima program bantuan pangan non tunai (BPNT).
- f. Akun Elektronik Bantuan Pangan. Akun elektronik program bantuan pangan non tunai (BPNT) diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau pasangan kepala keluarga.

2) Sasaran

Berdasarkan PERMENSOS RI No. 10 Tahun 2017 Pasal 3 Sasaran akses program keluarga harapan (PKH) merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Lalu berdasarkan PERMENSOS RI No. 10 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) sasaran program keluarga harapan (PKH) akses merupakan keluarga miskin dan rentan di wilayah program keluarga harapan (PKH) akses yang diusulkan oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Kemudian berdasarkan Pasal 5 dijelaskan bahwa:

a) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 dan 4 meliputi:

- (1) Ibu hamil/menyusui.
- (2) Anak berumur 0-6 tahun.

b) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 dan 4 meliputi:

- (1) Anak SD/MI sederajat.
- (2) Anak SMP/MTs sederajat.
- (3) Anak SMA/MA sederajat.
- (4) Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

c) Kriteria Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana di maksud dalam pasal 3 dan 4 meliputi:

(1) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun

(2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

e. Besaran Manfaat dan Pagu Program Bantuan Pangan Non Tunai

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden besaran manfaat dan pagu dalam Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1) Besaran Manfaat

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebesar Rp.110.000,00/ keluarga penerima manfaat (KPM)/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik bantuan pangan.

Pemilihan komoditas beras dan telur dalam program bantuan pangan non tunai (BPNT) berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi keluarga penerima manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi.

2) Pagu

Pagu jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan besaran jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non

tunai (BPNT). Dalam situasi dan kondisi tertentu pemerintah dapat menambah alokasi pagu bantuan pangan non tunai (BPNT) nasional.

Pagu bantuan pangan non tunai (BPNT) Provinsi merupakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai di setiap provinsi. Pagu bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu penerima bantuan pangan non tunai bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat (DPM).

Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan program bantuan pangan non tunai (BPNT). Pagu bantuan pangan non tunai (BPNT) kota merupakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai di setiap kota. Pagu bantuan pangan non tunai (BPNT) di setiap kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi. Pemerintah kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data daftar penerima manfaat (DPM). Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

Berdasarkan PERMENSOS RI No.10 Tahun 2017 pasal 34 terkait pendanaan. Dipaparkan bahwa sumber pendanaan program keluarga harapan (PKH) berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

- b. Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi.
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

f. Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

1) Persiapan Program

Proses persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan bank penyalur bantuan pangan non tunai.

- a. Koordinasi Pelaksanaan di Tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara kementerian/ lembaga pelaksana program dengan lembaga terkait. Koordinasi dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran Program Bantuan Pangan Non Tunai, Kemenko PMK selaku Ketua Tim Koordinasi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai, Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan sejumlah K/L lain. Koordinasi dengan kementerian lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan basis hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan bank penyalur dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai.

- 2) Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya.
- 3) Memastikan kecukupan jumlah dan sebaran lokasi e-warong dengan jenis usaha yang beragam.

b. Koordinasi Pelaksanaan di Tingkat Pemerintah Kota

Pemerintah kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan kelurahan untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta hingga penanganan pengaduan masyarakat. Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing kelurahan serta memastikan keterlibatan petugas kelurahan dalam proses tersebut.

Pemerintah kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, sosialisasi, kemudahan perizinan, keringanan biaya, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kota dapat mengusulkan kepada bank penyalur pedagang-pedagang yang biasa didatangi oleh anggota masyarakat untuk menjadi e-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur.

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan Tim koordinasi rastra yang didukung oleh koordinator kota PKH (Korkot PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di bawah pembinaan Dinas Sosial yang berperan dalam melakukan pendampingan program

bantuan pangan non tunai (BPNT) di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

2) Persiapan E-warong

Setelah bank penyalur mengetahui jumlah calon keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing lokasi penyaluran, Bank penyalur mengidentifikasi pedagang dan agen untuk selanjutnya dapat menjadi e-warong penyalur bantuan pangan non tunai pada masing-masing lokasi tersebut. Penetapan e-warong dilakukan sesuai ketentuan bank dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang diperlukan sebagai penyalur bantuan pangan non tunai. E-warong penyalur bantuan pangan non tunai memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank penyalur.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok Bahan Pangan bagi pembelian oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
- d. Menjual bahan pangan paling tidak mencakup beras atau telur sesuai harga pasar. Dalam hal ini, jumlah e-warong lebih dari satu di masing-

masing wilayah kelurahan/desa untuk menghindari adanya penetapan harga di atas harga wajar.

- e. Dapat melayani keluarga penerima manfaat (KPM) dan Non keluarga penerima manfaat (KPM).

Hal-hal yang perlu dipersiapkan bank penyalur terkait e-warong mencakup:

- a. Memastikan jumlah dan sebaran e-warong yang menjual beras atau telur di setiap lokasi penyaluran memadai sehingga tidak menimbulkan antrian penerima manfaat yang panjang dan lama saat melakukan transaksi. Rasion e-warong berbanding keluarga penerima manfaat (KPM) yang dipergunakan adalah 1:150, dan dalam satu kelurahan terdapat minimal dua (2)e-warong.
- b. Memberikan layanan perbankan kepada e-warong, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen laku pandai atau Lembaga Keuangan Digital, pemberian kredit usaha, dan layanan usaha lainnya.
- c. Bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan upaya edukasi pemasaran/*barnding*, perbaikan fasilitas *outlet*/toko e-warong dan lainnya untuk melayani keluarga penerima manfaat (KPM).
- d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian Bahan Pangan dengan menggunakan Kartu Kombo, termasuk:
 - 1) Menyediakan mesin pembaca Kartu Kombo pada e-warong.
Mesin pembaca kartu kombo dapat berupa EDC/ *Smartphone/Mobile Pos Device/Tablet/NFC reader/ Biometric reader* yang diberikan kepada e-warong untuk memproses pembelian bahan pangan.

- 2) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo kepada e-warong dan memastikan e-warong siap melayani keluarga penerima manfaat (KPM).
- 3) Bekerja sama dengan pihak lain (*principal*, perusahaan *Swicthing*) dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan bantuan pangan untuk memastikan cakupan layanan dan pengertian penggunaan kartu kombo.
- 4) Melakukan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran alat transaksi.

3) Sosialisasi Dan Edukasi

a. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah:

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan program bantuan pangan non tunai.
- 2) Memberikan pemahaman kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program bantuan pangan non tunai (BPNT).
- 3) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

b. Sasaran

- 1) Sasaran kegiatan sosialisasi dan edukasi adalah:
- 2) Kementerian/lembaga terkait.
- 3) Pemerintah Daerah termasuk Tikor Rastra dan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemsikinan (TKPK) Provinsi dan Kota.

- 4) Kecamatan.
- 5) Kelurahan.
- 6) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- 7) Ketua atau pengurus RT/RW.
- 8) KPM.
- 9) E-warong (warung, toko kelontong, koperasi, RPK, e-warong KUBE, dan lain-lain).
- 10) Masyarakat umum.

c. Bentuk Media Sosialisasi dan Edukasi

Media sosialisasi dan edukasi yang dapat digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Surat yang dikirim oleh Menteri Sosial kepada:

- a. K/L terkait dan Gubernur tentang kebijakan, program, jumlah sasaran.
- b. Walikota tentang kebijakan program, jumlah sasaran, informasi daftar penerima manfaat (DPM), serta rentang waktu pelaksanaan Pendaftaran Penerima Manfaat.
- c. Keluarga penerima manfaat (KPM) tentang informasi singkat dan kepesertaan dalam program.

2) Pedoman Umum Subsidi Rastra dan Pedoman Pelaksanaan

Bantuan Pangan Non Tunai 2017: berisi informasi lengkap mengenai program secara umum dan mekanisme pelaksanaan bantuan pangan

non tunai (bpnt), ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3) Lembar Panduan keluarga penerima manfaat (KPM): berisi informasi mekanisme pemanfaatan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan pengaduan, ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

4) Poster:

- a. Berisi informasi tentang program secara umum yang mencakup tujuan, sasaran dan manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT), ditujukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat umum.
- b. Berisi informasi mengenai mekanisme pemanfaatan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan pengaduan, ditujukan kepada RT/RW, Kelurahan, keluarga penerima manfaat (KPM), dan E-warong.

5) Lembar daftare-warong: Berisi informasi nama dan lokasi e-warong yang menjadi tempat pencairan program bantuan pangan non tunai (BPNT) ditujukan kepada RT/RW, kelurahan, dan keluarga penerima manfaat (KPM).

6) Audio: Berdurasi 1 menit, berisi informasi tentang program secara umum dan manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT), ditujukan kepada masyarakat umum.

7) Video:

- a. Berisi informasi tentang program secara umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan manfaat program bantuan pangan non tunai

(BPNT), ditujukan kepada masyarakat umum.

- b. Berisi informasi (video tutorial berdurasi ± 3 menit) tentang mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT), ditujukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui kelurahan.

8) Siaran Pers: berisi informasi tentang program secara umum yang mencakup tujuan, sasaran dan manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada masyarakat umum.

4) Pendaftaran Peserta

Proses pendaftaran peserta dan persiapannya dilaksanakan setelah Kementerian sosial mengirimkan data calon keluarga penerima manfaat (KPM) kepada pemerintah Kota.

Proses pendaftaran peserta adalah proses untuk:

- a. Mencocokkan data dalam daftar penerima manfaat (DPM) dengan dokumen-dokumen identitas keluarga penerima manfaat (KPM).
- b. Menyerahkan kit bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang dokumen identitasnya sesuai dengan data dalam daftar penerima manfaat (DPM).
- c. Melakukan edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memperoleh kit bantuan pangan non tunai.
- d. Melakukan penggantian keluarga penerima manfaat (KPM) dalam daftar penerima manfaat (DPM) yang tidak ditemukan.

Proses pendaftaran peserta dilakukan secara bersama oleh pemerintah Kota (dalam hal ini petugas kelurahan) dan petugas dari bank penyalur untuk masing-masing kelurahan di kantor kelurahan, atau ruangan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Seluruh proses pendaftaran peserta (sampai disahkannya daftar akhir keluarga penerima manfaat (KPM) oleh Walikota dalam aplikasi) harus selesai selambat-lambatnya 60 hari setelah daftar penerima manfaat (DPM) diterima oleh pemerintah kota dan bank penyalur.

Pengiriman Surat Pemberitahuan Calon Penerima Manfaat:

Sebelum proses pendaftaran dilaksanakan, calon keluarga penerima manfaat (KPM) diinformasikan terlebih dahulu terkait status kepesertaanya oleh Menteri Sosial yang disampaikan melalui surat. Penyampaian surat pemberitahuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dapat dilaksanakan melalui pemerintah daerah, bank penyalur dan/atau pos. Surat pemberitahuan ditujukan kepada tiga nama anggota keluarga calon keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menghindari adanya kesalahan tujuan pengiriman. Informasi-informasi yang disampaikan dalam surat mencakup antara lain:

a. Informasi identitas keluarga penerima manfaat (KPM), yaitu:

- 1) Nama pasangan kepala keluarga.
- 2) Nama kepala keluarga.
- 3) Nama anggota keluarga (lainnya).
- 4) Alamat tinggal keluarga.

- 5) Nomor induk kependudukan (NIK) (jika ada).
 - 6) Kode unik keluarga yang terikat dengan *database* daftar penerima manfaat (DPM) dan akan menjadi penanda keabsahan calon penerima manfaat.
- b. Pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk dalam daftar calon keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai (BPNT).
- c. Informasi bahwa calon keluarga penerima manfaat (KPM) yang namanya tertera di dalam undangan harus mengikuti proses pendaftaran peserta yang waktu dan tempatnya akan diumumkan kemudian oleh pemerintah kota melalui petugas kelurahan.
- d. Informasi bahwa pendaftaran peserta terutama harus dihadiri oleh nama pertama yang terdapat di dalam surat pemberitahuan. Apabila berhalangan, nama tersebut dapat digantikan oleh anggota keluarga lainnya yang namanya tercantum dalam surat pemberitahuan.
- e. Informasi mengenai dokumen-dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mengikuti proses pendaftaran peserta, yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identifikasi seperti kartu tanda penduduk (KTP) Kartu Keluarga atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari keluarga penerima manfaat (KPM).

Persiapan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Bank. Pemerintah kota melakukan koordinasi dengan bank penyalur untuk melaksanakan pendaftaran calon penerima manfaat melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pada bulan Desember 2016, bank penyalur dan setiap pemerintah kota yang melaksanakan program bantuan pangan non tunai 2017 menerima Data Penerima Manfaat-1 (DPM) dari Kementerian Sosial yang diakses melalui aplikasi perubahan data.
2. Pemerintah kota dan bank penyalur bersama menyusun jadwal dan lokasi pendaftaran peserta per kelurahan.
 - a. Pendaftaran peserta dilakukan per kelurahan di kantor kelurahan atau ruangan lain yang disepakati oleh petugas kelurahan dan petugas dari bank penyalur.
 - b. Lamanya periode pendaftaran peserta tiap kelurahan dapat disesuaikan dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di kelurahan tersebut. Kelurahan dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sekitar 200 membutuhkan dua petugas (satu petugas kelurahan dan satu petugas bank penyalur) yang bekerja selama dua hari kerja. Kelurahan dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) lebih banyak akan membutuhkan waktu lebih lama. Apabila diperlukan, bank penyalur merekrut tenaga tambahan untuk menjadi petugas pendaftaran peserta di tingkat kelurahan.
3. Pemerintah kota dan bank penyalur bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan pendaftaran peserta. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:
 - a. Pemerintah kota menugaskan sejumlah petugas kelurahan di tiap kelurahan untuk mencocokkan data dalam daftar penerima manfaat

(DPM) dengan dokumen identitas keluarga penerima manfaat (KPM).

- b. Untuk kelurahan-kelurahan yang tidak memiliki akses internet, Pemerintah kota mencetak:
 - i. Daftar keluarga di setiap kelurahan tersebut untuk dilakukan pengecekan data secara manual.
 - ii. Formulir rekapitulasi pengganti.
- c. Pemerintah kota memberitahukan kepada petugas kelurahan untuk mendukung penuh pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dengan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK untuk mengurus dokumen mereka.
- d. Bank penyalur menugaskan sejumlah petugas bank di tiap kelurahan untuk mencocokkan data pada rumah rekening dengan dokumen identitas keluarga penerima manfaat (KPM) dan menyerahkan kit bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
- e. Bank penyalur mempersiapkan kit bantuan pangan non tunai yang terdiri dari kartu kombo, PIN (*Personal Identification Number*), dan informasi program.
- f. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) membantu memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di dalam daftar penerima manfaat (DPM) untuk hadir dalam pendaftaran peserta.

5) Pelaksanaan Pendaftaran Penerima Manfaat

- a. Keluarga penerima manfaat (KPM) mengambil nomor antrian.
- b. Keluarga penerima manfaat (KPM) menunggu giliran sambil mempelajari materi sosialisasi mengenai program bantuan pangan non tunai.
- c. Setelah dipanggil, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menuju petugas kelurahan dengan membawa surat pemberitahuan dan dokumen identifikasi.
- d. Petugas kelurahan mencocokkan kesesuaian data daftar penerima manfaat (DPM) dengan dokumen identitas yang dibawa oleh keluarga penerima manfaat (KPM).
- e. Keluarga penerima manfaat (KPM) menuju meja petugas bank.
 - 1) Bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki telepon seluler, petugas bank menginput nomor telepon seluler keluarga penerima manfaat (KPM) yang tetap (tidak berubah-ubah) ke dalam aplikasi perubahan data untuk keperluan notifikasi bank penyalur.
 - 2) Setelah itu, petugas bank menyerahkan kit bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dan melakukan edukasi tentang penggunaan kit. Kartu kombo akan diaktivasi pada waktu yang diinformasikan oleh petugas bank. Petugas bank menginput dalam aplikasi perubahan data bahwa kit bantuan pangan non tunai untuk keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut telah diserahkan.
- f. Untuk keluarga penerima manfaat (KPM) berkebutuhan khusus (lansia, penyandang disabilitas, keluarga penerima manfaat (KPM) dengan kepala keluarga yang sakit keras dan lainnya), proses

pendaftaran peserta akan menggunakan mekanisme yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan bank penyalur.

- g. Pada akhir proses pendaftaran peserta, petugas kelurahan menandai:
- (1) Keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak ditemukan dan tidak melakukan pendaftaran peserta sampai masa pendaftaran selesai;
 - (2) Keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah pindah dari kelurahan tersebut;
 - (3) Keluarga penerima manfaat KPM yang dengan sukarela menolak bantuan; melalui aplikasi perubahan data.

6) Penyaluran Bantuan

a. Transfer Dana Bantuan Pangan

- 1) Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan data penerima manfaat (DPM) Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial. Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan data penerima manfaat (DPM).
- 2) Pemindahbukuan dana bantuan pangan dari rekening Kementerian Sosial pada bank penyalur ke akun elektronik bantuan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan 30 (tiga puluh) hari sejak dana ditransfer dari kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di bank penyalur.
- 3) Transfer dana bantuan pangan ke akun elektronik bantuan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak dikenakan biaya administrasi.

- 4) Aktivasi dilakukan melalui sistem bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan pangan ke akun elektronik bantuan pangan keluarga penerima manfaat (KPM).
- b. Notifikasi Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- 1) Bank penyalur memberikan notifikasi dana bantuan pangan yang sudah ditransfer ke akun elektronik bantuan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) antara lain dapat berupa SMS ke nomor HP keluarga penerima manfaat (KPM) atau bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menginformasikan ke keluarga penerima manfaat (KPM) hal-hal terkait bantuan pangan non tunai.
 - 2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada poin di atas sekurang-kurangnya meliputi informasi bahwa transfer dana bantuan pangan ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) sudah dilakukan serta jumlah dana bantuan pangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi informasi bahwa transfer dana bantuan pangan ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) sudah dilakukan serta jumlah dana bantuan pangan tersebut.
 - 3) Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab bank penyalur dan tidak memotong besaran bantuan pangan.

7) Pemanfaatan Bantuan

- a. Pembelian bahan pangan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) pada e-warong
- 1) Pembelian bahan pangan dilakukan pada *outlet*/toko e-warong yang

sudah bekerjasama dengan bank penyalur di wilayah keluarga penerima manfaat (KPM).

- 2) Keluarga penerima manfaat (KPM) mendatangi e-warong untuk membeli bahan pangan dengan memanfaatkan kartu kombo.
- 3) Pembelian bahan pangan dilakukan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan bank penyalur yang dapat disusun bersama *principal* atau perusahaan *Switching*.
- 4) Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan sosial pangan yang diterimanya.

b. Bukti Transaksi Bantuan Pangan

1. Bank penyalur menyiapkan bukti transaksi bantuan pangan yang dapat berupa cetak resi dari mesin pembaca alat pembayaran elektronik bantuan pangan, atau lainnya.
2. Bank penyalur, keluarga penerima manfaat (KPM), dan pedagang bantuan menyimpan bukti transaksi.
3. Bukti transaksi dapat memuat informasi sisa jumlah dana yang masih tersedia pada akun elektronik keluarga penerima manfaat (KPM).

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mayang S. Junaidi, Bambang M. S., Wahyu dyah P. (Universitas Diponegoro Tahun 2017) yang berjudul “*The Satisfaction Comparison Of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients And RASTRA Recipients In Cakung District, East Jakarta*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (RASTRA), juga untuk

menganalisis apakah tingkat kepuasan penerima BPNT lebih tinggi dari tingkat kepuasan penerima RASTRA. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan multistage random sampling untuk mengambil jumlah sampel penelitian. Sampel dipilih dengan menerapkan proporsional sampling dan random sampling. Data yang dihimpun oleh wawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Metode analisis data yang digunakan adalah *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan z analisis pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan CSI penerima BPNT adalah 74,3%, sedangkan tingkat kepuasan penerima RASTRA adalah 62,9%. Hasil perhitungan pengujian hipotesis z signifikan pada level 5%. Interpretasi tingkat CSI penerima BPNT dikategorikan sebagai 'sebab keprihatinan', sementara tingkat RASTRA dikategorikan sebagai 'sangat miskin'. Atau, pemerintah harus mengevaluasi dan meningkatkan jumlah pasokan makanan dan e-Warong dalam Program BPNT untuk meningkatkan tingkat kepuasan penerima program. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mengurangi risiko penerima BPNT yang tidak menerima pasokan makanan.

Persama penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai. Perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan penulis hanya memfokuskan pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai saja, sedangkan penelitian ini membahas Kepuasan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Dan Penerima Rastra. Sehingga kontribusi penelitian yang

dilakukan oleh Mayang S. Junaidi, Bambang M. S., Wahyu dyah P. terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah untuk memberikan referensi terkait persamaan variabel penelitian yang sama-sama membahas mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam fokus permasalahan kepuasan penerima bantuan yang dapat menunjang efektivitas program tersebut. Sehingga dapat memberikan tambahan referensi mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap penulisan penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Surya K., dan Weni Rosdiana (Universitas Negeri Surabaya Tahun 2018) yang berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Pelaksana program ini adalah Menteri Sosial RI. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Dengan menggunakan enam indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Sumber daya manusia, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi program.

Karakteristik agen pelaksana masih ada yang bersikap tidak ramah sehingga tidak menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang pengetahuannya kurang sehingga tidak mendukung program bantuan. Disposisi implementor terjadi beberapa sikap pelaksana yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sehingga dapat menghambat jalannya program ini. Dengan ini saran yang dapat diberikan adalah Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidakvalidan data. Perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas terkait dalam menangani masalah fasilitas mesin EDC. Perlu adanya evaluasi terkait implementor yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perlu adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama membahas mengenai program pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai, bedanya penulis membahas keefektifan pelaksanaan program secara umum di suatu lingkungan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implementasi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-warong. Sehingga kontribusi penelitian yang dilakukan oleh Ika Surya K., dan Weni Rosdiana terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah untuk memberikan referensi terkait persamaan variabel penelitian yang sama-sama membahas mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai

yang dapat memberikan tambahan referensi mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap penulisan penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Astuti, Holilullah Holilullah, Yunisca Nurmalisa (Universitas Lampung Tahun 2016) yang berjudul “Persepsi Masyarakat Prasejahtera Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Distributif Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat prasejahtera di Kelurahan Sidodadi Padasuka Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 225 kepala keluarga dengan sampel yang diambil sebanyak (15%) dari populasi yaitu 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat prasejahtera terhadap pelaksanaan kebijakan distributif melalui program keluarga harapan berada pada kategori baik dengan persentase 55,89% atau 19 responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat prasejahtera memiliki pemahaman, tanggapan, dan harapan yang positif terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Padasuka Kabupaten Pringsewu.

Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang pelaksanaan kebijakan sosial yang juga bagian dari kebijakan distributif berupa program pelayanan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu program ini memiliki mekanisme pelaksanaan yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada program sosial pengentasan kemiskinan yang di teliti. Pada penelitian yang dilakukan penulis meneliti tentang program bantuan pangan non tunai

(BPNT) sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang program keluarga harapan (PKH). Sehingga kontribusi penelitian oleh Yuni Astuti terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah untuk memberikan tambahan referensi mengenai kebijakan publik distributif terkait program pelayanan sosial terhadap penulisan penelitian.

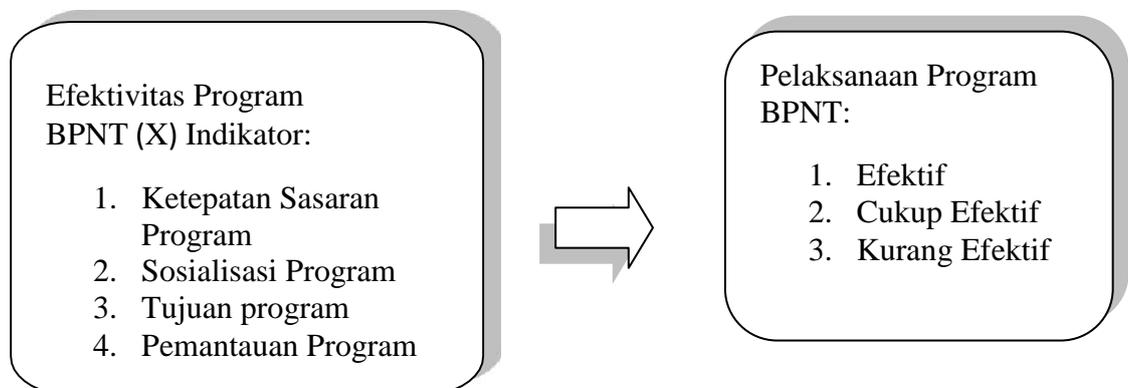
C. Kerangka Pikir

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah kartu bantuan dari program dari pemerintah yang diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah data masuk ke dalam program keluarga harapan (PKH) atau keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong). Keluarga yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai. Pada Tahun 2017 keluarga penerima manfaat (KPM) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

Pagu bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam daftar penerima manfaat (DPM).. Pemerintah kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data daftar penerima manfaat (DPM).

Tujuan bantuan pangan non tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program bantuan pangan non tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif.

Implikasi kebijakan ini pada kenyataan tidak sesuai dengan tujuan pemerintah, pemanfaatan bantuan pangan non tunai yang diberikan oleh penerima bantuan masih belum bijak dalam menggunakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan juga beberapa penerima BPNT tidak tepat sasaran sehingga muncul berbagai sikap negatif dari masyarakat, sehingga pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan belum termanifestasikan. Berdasarkan hal itu maka Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dapat dilihat dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian supaya suatu permasalahan dalam penelitian yang di cari pemecahan masalahnya dapat mendapatkan data permasalahan dalam penelitian yang tepat. Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Metode yang diperlukan dalam suatu penelitian ialah metode yang sesuai dengan masalah yang akan di teliti, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Menurut Arikunto (2010: 203) “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan bantuan pangan non tunai di kelurahan Gulak Galik.

Menurut Setyosari (2012: 39) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif ialah:

Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Penelitian deskriptif untuk mengetahui status atau kedudukan sesuatu.

Kemudian menurut Setyosari (2012:37) “Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan melalui pengumpulan data angka (*numerical data*) berdasarkan tindakan atau perilaku yang dapat diamati dari sampel-sampel dan kemudian mengolah data tersebut dengan analisis berbentuk angka”.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Salah satu langkah dalam penelitian ilmiah adalah menentukan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini ialah para penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Menurut Arikunto (2010: 173) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua lika-liku yang ada dalam populasi. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Kemudian menurut Setyosari (2012:188) “Populasi merujuk pada keseluruhan kelompok dari mana sampel-sampel diambil”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah keluarga yang menerima manfaat atau peserta program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik sebanyak 336 kepala keluarga yang tersebar ke dalam 24 wilayah RT di Kelurahan Gulak Galik seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penerima Bantuan Pangan Non Tumi (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

No	Lokasi RT	Penerima BPNT
1	RT 01	6 KK
2	RT 02	2 KK
3	RT 03	12 KK
4	RT 04	12 KK
5	RT 05	8 KK
6	RT 06	-
7	RT 07	22 KK
8	RT 08	8 KK
9	RT 09	17 KK
10	RT 10	10 KK
11	RT 11	2 KK
12	RT 12	18 KK
13	RT 13	18 KK
14	RT 14	10 KK
15	RT 15	12 KK
16	RT 16	16 KK
17	RT 17	16 KK
18	RT 18	42 KK
19	RT 19	47 KK
20	RT 20	10 KK
21	RT 21	16 KK
22	RT 22	9 KK
23	RT 23	11 KK
24	RT 24	12 KK
	Jumlah	336 KK

Sumber: Data sekunder Kelurahan Gulak Galik

2. Sampel

Sampel ialah bagian yang ditarik dari suatu populasi yang akan diteliti.

Menurut Arikunto (2010: 174) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel”. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat

kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

Menurut Arikunto (2006: 134) “Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 10 % dari jumlah populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* dengan cara undian dan diambil secara *proportional* dimana sampel dialokasikan dari penerima manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tersebar di 24 RT wilayah Kelurahan Gulak Galik. Menurut Arikunto (2006: 182) “Pada umumnya teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian memang tidak tunggal, tetapi gabungan dari 2 atau 3 teknik”.

Berdasarkan jumlah populasi sebesar 336 kepala keluarga penerima manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Maka sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{10}{100} \times 336 = 33,6 \text{ dibulatkan menjadi } 34 \text{ KK penerima manfaat}$$

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik yang tersebar ke dalam 24 wilayah RT seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

No	Lokasi RT	Penerima BPNT
1	RT 01	1 KK
2	RT 02	1 KK
3	RT 03	1 KK
4	RT 04	1 KK

5	RT 05	1 KK
6	RT 06	-
7	RT 07	2 KK
8	RT 08	1 KK
9	RT 09	1 KK
10	RT 10	1 KK
11	RT 11	1 KK
12	RT 12	2 KK
13	RT 13	2 KK
14	RT 14	1 KK
15	RT 15	1 KK
16	RT 16	1 KK
17	RT 17	1 KK
18	RT 18	5 KK
19	RT 19	5 KK
20	RT 20	1KK
21	RT 21	1 KK
22	RT 22	1 KK
23	RT 23	1 KK
24	RT 24	1 KK
	Jumlah	34 KK

Sumber: Data sekunder Kelurahan Gulak Galik

Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 34 responden keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik yang diambil secara *proportional* dengan cara undian dan dialokasikan dari 24 wilayah RT di Kelurahan Gulak Galik.

C. Variabel Penelitian

Menurut sutrisno Hadi dalam Arikunto (2010: 159) “Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.

Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel (variabel tunggal), yaitu efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dimana terdapat ukuran dalam mengukur efektivitas yaitu indikator ketepatan sasaran

program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara. Tujuan bantuan pangan non tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

b. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Efektivitas merupakan suatu gambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil dari diselenggarakannya suatu kegiatan atau program, yang dapat menyatakan sejauh mana capaian dari suatu tujuan serta ukuran berhasil atau tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Efektivitas ialah keadaan yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu target. Misalnya dalam keberhasilan bantuan pangan non tunai (BPNT), efektif atau tidaknya dapat dilihat dari salah satunya pemanfaatan bantuan tersebut dan sasaran bantuan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai dalam sebuah aturan program tersebut. Untuk mengukur efektivitas program dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

2. Definisi Operasional

a. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Efektivitas pelaksanaan Program BPNT ialah hasil dari tercapainya tujuan serta ukuran berhasil atau tidaknya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah dilaksanakan di Kelurahan Gulak Galik berdasarkan persepsi masyarakat penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik dengan indikator ukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan program
4. Pemantauan Program

b. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

Pelaksanaan Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif.

Indikator efektivitas Pelaksanaan Program BPNT pada penelitian ini dilaksanakan dengan mekanisme berikut:

1. Persiapan dan Pelaksanaan Program

2. Sosialisasi dan Edukasi
3. Penyaluran Bantuan
4. Pemanfaatan Bantuan

E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dalam pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa angket yang berisikan besaran tingkatan efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yaitu:

1. Efektif
2. Cukup efektif
3. Kurang efektif

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik menggunakan indikator ukuran efektivitas menurut Budiani yaitu indikator ketepatan sasaran program, indikator sosialisasi program, indikator tujuan program dan indikator pemantauan program berdasarkan persepsi masyarakat penerima manfaat program BPNT di Kelurahan Gulak Galik.

Angket yang diberikan adalah angket tertutup yang berisi dan berdasarkan indikator dari efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai.

Angket akan berbentuk pertanyaan dan pilihan dengan akan diberikan tiga pilihan kemudian responden harus memilih salah satu pilihan jawaban.

Kemudia didukung dengan wawancara tertutup dengan beberapa penerima manfaat program dan pelaksanaa program di Kelurahan Gulak Galik.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2010: 161) “Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka”. Sehingga Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh pencatatan dalam segala informasi berupa fakta dan angka atau hal-hal sebagian atau keseluruhan mengenai variabel-variabel atau sebagian atau seluruh populasi secara akurat dan lengkap sehingga dapat menunjang atau mendukung keberhasilan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teknik pokok dan teknik penunjang.

1. Teknik Pokok

a. Angket

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik angket sebagai teknik pokok untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Gulak Galik .

Menurut Arikunto (2010: 194) “Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui”.

Dalam hal ini peneliti menggunakan angket tertutup dan angket skala likert dengan kriteria Efektif, Cukup Efektif, dan Kurang Efektif.

Setiap item soal memiliki 3 alternatif jawaban yang terdiri dari 3 opsi yaitu a, b, dan c.

Pemberian nilai dilakukan dengan ketentuan berikut:

1. Memilih alternatif A diberi skor 3
2. Memilih alternatif B diberi skor 2
3. Memilih alternatif C diberi nilai 1

(Arikunto, 2010: 285)

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Teknik wawancara diambil untuk mendapatkan informasi penunjang data penelitian. Wawancara dilakukan dengan penerima BPNT dan responden lainnya yang telah ditentukan agar dapat mendapatkan informasi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui angket.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data penunjang dari objek penelitian. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi pengambilan data diperoleh dari dokumen-dokumen dan informasi-informasi. Adapun data tertulis yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu berupa dokumen atau profil kelurahan, data jumlah penerima BPNT di Kelurahan Gulak Galik.

G. Uji Kelayakan Instrumen

1. Uji Validitas

Penelitian yang menggunakan pengujian validitas memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah penelitian. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010: 211). Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.

Untuk mengetahui validitas angket tidak dilakukan uji coba sehingga dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah *logical validity*, yaitu peneliti melakukan kontrol langsung terhadap indikator-indikator yang ada dengan cara mengkonsultasi langsung kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengukur data dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga (Arikunto, 2010: 221).

Maka langkah-langkah uji reliabilitas yang dilakukan adalah:

- a. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden untuk uji angket.
- b. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau genap ganjil.

Hasil uji coba angket dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.3 Distribusi Skor Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Ganjil (X)

No	Item Ganjil									Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	
1	3	3	3	1	2	3	3	2	2	22
2	1	2	3	2	2	3	2	3	3	21
3	2	3	3	2	3	3	2	3	2	23
4	3	3	2	2	3	3	3	3	1	23
5	3	3	2	1	2	3	3	2	3	22
6	3	2	2	3	2	2	3	3	2	22
7	3	3	3	2	2	2	2	3	2	22
8	3	3	3	2	2	3	3	3	1	23
9	2	2	2	2	2	3	2	3	3	21
10	3	3	3	3	3	3	2	2	1	23
Jumlah										222

Sumber: Analisis data uji coba angket

Dari tabel 4.1 diketahui $\sum X = 223$ yang merupakan hasil penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penilaian.

Selanjutnya disajikan data hasil item genap (Y) sebagai berikut:

Tabel 3.4 Distribusi Skor Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Genap (Y)

No	Item Genap									Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
1	3	2	2	2	2	3	3	3	3	23
2	2	1	3	1	3	2	2	3	3	20
3	2	2	2	1	3	3	3	3	3	22
4	3	2	3	1	3	3	2	3	2	22
6	3	2	2	2	2	3	1	3	2	20
7	3	2	2	2	3	1	2	3	3	21
8	3	3	3	2	3	3	3	3	2	25
9	2	1	2	3	3	2	1	3	2	19
10	3	3	3	1	3	1	2	3	3	22
Jumlah										219

Sumber: Analisis data uji coba angket

Dari tabel 4.2 diketahui $\sum Y = 221$ yang merupakan hasil penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan item genap (Y). Setelah memperoleh hasil penjumlahan dari uji coba angket, langkah selanjutnya adalah membuat tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan genap (Y) untuk kemudian diolah menggunakan rumus *Product Moment*.

Tabel 3.5 Tabel Kerja Antara Item Ganjil (X) Dengan Item Genap (Y) Dari Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	22	23	484	529	506
2	21	20	441	400	420
3	23	22	529	484	506
4	23	22	529	484	506
5	22	25	484	625	550
6	22	20	484	400	440
7	22	21	484	441	462
8	23	25	529	625	575
9	21	19	441	361	399
10	23	22	529	484	506
Jumlah	222	219	4934	4833	4870

Sumber: Analisis data uji coba angket

Berdasarkan tabel 4.3 kerja uji coba angket diperoleh data item ganjil (X) dan item genap (Y), maka diketahui bahwa:

$$X = 222$$

$$Y = 219$$

$$X^2 = 4934$$

$$Y^2 = 4833$$

$$XY = 4870$$

- c. Selanjutnya, mengkorelasikan item ganjil genap dengan rumus

Product Moment menurut Arikunto (2010: 213) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{10(4870) - (222)(219)}{\sqrt{\{10(4934) - (222)^2\} \{10(4833) - (219)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{48910 - 48618}{\sqrt{\{49340 - 49284\} \{48330 - 47961\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{292}{\sqrt{\{56\} \{369\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{82}{\sqrt{20664}}$$

$$r_{xy} = \frac{82}{143,74}$$

$$r_{xy} = 0,57$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien korelasi antara gejala x dan y

X : Skor rata-rata dari X

Y : Skor rata-rata dari Y

N : Jumlah sampel

(Arikunto, 2010: 213)

- d. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket

digunakan rumus *Spearman-Brown* menurut Arikunto (2010: 223),

yaitu :

$$r_{11} = \frac{2 (r_{1/21/2})}{(1 + r_{1/21/2})}$$

$$= \frac{2 (0,57)}{(1 + 0,57)}$$

$$= \frac{1,14}{1,57}$$

$$r_{11} = 0,72$$

Keterangan :

r_{11} : Reliabilitas Instrumen

$r_{1/21/2}$: r_{xy} yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen

- e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat realibilitas. Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian peneliti mengkorelasikan dengan tingkat reliabilitas yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai r

Besarnya nilai r	Interpretasi
Antara 0,800 sampai dengan 1,00	Tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800	Cukup
Antara 0,400 sampai dengan 0,600	Agak rendah
Antara 0,200 sampai dengan 0,400	Rendah
Antara 0,000 sampai dengan 0,200	Sangat rendah (Tak berkolerasi)

Sumber: (Arikunto, 2010: 319)

Dengan diperolehnya hasil 0,72, jika dihubungkan dengan kriteria reliabilitas yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto maka koefisien alat ukur tersebut termasuk ke dalam kategori cukup yaitu terletak antara 0,600 – 0,800. Dengan demikian angket tentang “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung” telah memenuhi syarat untuk dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data kemudian diolah atau dianalisis. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dan dalam kalimat serta angka secara sistematis. Informasi disajikan dalam bentuk penguraian dan presentase pada setiap tabel untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sujarweni dan Endrayanto (2012: 39) untuk menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I: Interval

NT: Nilai Tertinggi

NR: Nilai Terendah

K: Kategori

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase sebagai berikut (Martono, 2010: 41):

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Besarnya persentase

F : Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N : Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut (Arikunto, 2010: 196):

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang Baik

I. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk persiapan penelitian yang pada hakikatnya bersifat sistematis meliputi perencanaan penelitian, persiapan penelitian hingga prosedur dan teknis pelaksanaan suatu penelitian di lapangan. Hal ini dilakukan agar penelitian yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah peneliti rencanakan. Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti laksanakan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal melakukan penelitian ini adalah mengajukan judul penelitian kepada pembimbing akademik dengan dua alternatif judul pada tanggal 25 September 2018. Dari dua alternatif judul yang diajukan kemudian dipilih alternatif judul pertama yang disetujui oleh Ketua Program Studi PPKn dengan menetapkan pembimbing utama yaitu Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. dan pembimbing II yaitu bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. yang akan membimbing penulis selama penyusunan skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung”.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor 6597/UN26.13/PN.01.00/2018, lalu dilakukanlah penelitian pendahuluan di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Penelitian pendahuluan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka penyusunan skripsi, ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dosen pembimbing. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta data dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT), jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan profil Kelurahan Gulak Galik.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan tersebut dibuatlah proposal penelitian untuk diseminarkan. Proposal penelitian disetujui oleh pembimbing II pada tanggal 1 November 2018, kemudian disetujui oleh pembimbing I pada tanggal 6 November 2018 serta disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Langkah selanjutnya adalah mendaftar seminar proposal dan pada tanggal 22 November 2018 dilaksanakan seminar proposal. Seminar proposal tersebut diadakan dengan tujuan memperoleh saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk dosen pembahas demi keberhasilan skripsi dan yang akan membantu dalam penyelesaian skripsi.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan, maka dilaksanakan seminar proposal. Setelah kegiatan seminar proposal pada tanggal 22 November 2018 dilaksanakan, selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan proposal skripsi sesuai masukan dan saran dari dosen pembahas pada saat seminar proposal. Setelah perbaikan proposal selesai, lalu dilakukan pengesahan oleh dosen pembahas untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

4. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan Administrasi

Persiapan administrasi yang dilakukan pada tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan berdasarkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor 205/UN26.13/PN.01.00/2019 yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Gulak Galik Kota Bandar Lampung.

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket tertutup yang diberikan kepada 34 responden dengan jumlah 18 item soal pertanyaan yang disertai 3 (tiga) alternatif jawaban serta teknik penunjang dengan menggunakan wawancara tertutup dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan angket sebagai berikut:

1. Membuat kisi-kisi angket tentang efektivitas pelaksanaan program

bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

2. Membuat item-item pertanyaan angket tentang efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
3. Mengkonsultasikan angket kepada pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan bimbingan dan persetujuan.
4. Setelah angket disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II, maka peneliti mengadakan uji coba angket kepada sepuluh orang di luar responden. Setelah di uji reliabilitasnya, angket tersebut kemudian diberikan kepada responden yang sebenarnya.

c. Penelitian Di Lapangan

Penelitian di lapangan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2018 sampai 14 Januari 2019 dengan menyebarkan angket kepada keluarga penerima manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) berjumlah 34 responden dengan jumlah item 18 butir soal angket yang telah disediakan pilihan jawabannya untuk para responden.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik dengan melihat hasil persentase pengukuran pada 4 indikator untuk mengukur efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program berdasarkan persepsi masyarakat penerima manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 maka dapat disimpulkan bahwa

Pada indikator pertama yaitu ketepatan sasaran program diperoleh hasil penelitian sebesar 62% masuk ke dalam kategori efektif. Dengan demikian bahwa efektivitas program bantuan pangan non tunai (BPNT) pada kategori ketepatan sasaran program sudah berjalan efektif dengan sudah sesuainya ketepatan sasaran program dengan syarat kepesertaan program meskipun masih ada sedikit yang tidak efektif. Selanjutnya pada kategori ke dua yaitu sosialisasi program diperoleh hasil penelitian dengan persentase tertinggi sebesar 44% cukup efektif . Artinya pelaksanaan sosialisasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik menurut beberapa peserta

program telah berjalan cukup efektif meskipun masih ada kekurangan yang harus terus ditingkatkan seperti salah satunya intensitas pelaksanaan sosialisasi program dan pemahaman peserta program terhadap segala bentuk mekanisme program. Kemudian pada kategori ke tiga yaitu tujuan program diperoleh hasil persentase tertinggi sebesar 79%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan dan manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah dirasakan oleh para penerima manfaat dengan baik meskipun menurut beberapa peserta program masih terdapat kekurangan seperti keterlambatan pencairan dana yang masih terjadi di beberapa peserta program namun hal itu dapat terus diupayakan untuk ditingkatkan dan di evaluasi kelancaran pencairan dananya. Lalu kategori terakhir yaitu kategori pemantauan program, diperoleh hasil persentase sebesar 56% termasuk ke dalam kategori cukup efektif. Hal ini karena menurut beberapa peserta program sudah dilakukan evaluasi yang cukup baik hanya perlu ditingkatkan lebih ketat dan maksimal lagi agar program semakin berjalan efektif.

Berdasarkan persentase berikut: Ketepatan Sasaran Program 62% efektif, Sosialisasi Program 44% Cukup Efektif, Tujuan Program 79% efektif, dan Pemantauan Program 56% efektif. Dengan demikian jelas dapat disimpulkan kembali dalam penelitiann ini dari keempat indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik bahwa berdasarkan persepsi masyarakat terkait efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Tahun 2018 pelaksanaannya sudah berjalan efektif dan hanya perlu

ditingkatkan pada indikator yang masih termasuk kategori cukup efektif agar program dapat berjalan lebih efektif secara keseluruhan.

B. Saran

Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis data, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Galik Galik maka peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar lebih ditingkatkan pembaharuan data terpadu program penanganan fakir miskin atau data daftar penerima manfaat program bantuan pangan non tunai (BPNT) sehingga peserta program atau penerima manfaat ialah benar-benar penduduk yang memiliki kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana. Selain itu untuk lebih memperhatikan kelancaran penyaluran dana bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan peningkatan kerjasama yang semakin baik mengingat salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan ketepatan waktu penerimaan bantuan dan ditambah dengan peningkatan efektivitas petugas program bantuan pangan non tunai (BPNT) di wilayah pelaksanaan dalam memberikan informasi dan pelayanan terkait program.
2. Bagi Kelurahan Galik Galik dan para *stakeholders* yang berkaitan dengan program bantuan pangan non tunai (BPNT) agar dapat memberikan pelayanan dan penginformasian program yang lebih maksimal agar program yang sudah berjalan cukup efektif dapat meningkat efektivitasnya.

3. Bagi para penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk lebih memahami mekanisme manfaat dan tujuan serta mekanisme pelaksanaan dan pengaduan bantuan pangan non tunai lebih baik lagi serta bersikap kritis dalam mendukung kebijakan pemerintah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Astuti Yuni, Nurmalisa Yunisca, Holillulloh. 2016. Persepsi Masyarakat Prasejahtera Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Distributif Melalui Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 4. Nomor 3.
- Rachman Benny, A.Agustian, Wahyudi. 2018. Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt). *Analisis Kebijakan Pertanian. Litbang Pertanian*. Volume 16. Nomor 1.
- Jefry Ignasius, R.Susiola, Surya A. 2015. Analisis Penerapan Gaya Mengajar Kepemimpinan Situasionalterhadap Efektifitas Mengajar (Studi Kasus Di Sma Negeri 85 Jakarta Barat). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Mercubuana*. Volume VII. Nomor 3.
- Ika Surya Kharismawati. 2018. *Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. [skripsi]*. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya: Diterbitkan.
- Kementerian Hukum Dan HAM. 2011. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011.
- Kepala Biro Hukum Dan Kemensos 2017. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kepala Biro Hukum Dan Kemensos.
- Kepala Biro Hukum Dan Kemensos 2016. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kepala Biro Hukum Dan Kemensos.
- Lembaga Negara Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Tentang Penyaluran

- Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Jakarta: Lembaga Negara Indonesia.
- Lampungprov.go.id. *Dinsos Targetkan Bansos PKH capai 99 Persen Di 2018*.
- Martono, Nanang. 2010. *Statistik Sosial Teori Dan Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Steers, M.Richard. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mayang S., Junaidi, Bambang M, Wahyu Dyah. 2017. *The Satisfaction Comparison Of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients And Rastra Recipients In Cakung District, East Jakarta*. *Jurnal Ilmiah Econosains Undip*. Volume 15. Nomor 2.
- Molaga. 2015. Persepsi Mahasiswa Terhadap Efektifitas Pembelajaran Melalui Grup Di Facebook. *JISIP. Unitri*. Volume 4. Nomor 1.
- Pratiwi Monica, Nurcahyanto Herbasuki. 2017. Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Srandol). *Jurnal of public policy and management review. Undip*. Volume 6. Nomor 2.
- N. Dunn, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. *Kementerian Bappenas, Kementerian Sosial RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden RI, TN2PK*.
- Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. *Subsidi Beras: Skema Baru, Pskk Ugm Melakukan Survei Monev*. Diakses dari
- Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. *SKRT 2017: Program RASTRA Masih Hadapi Persoalan Ketidaktepatan*.
- Reinke, William. 1994. *Perencanaan Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektivitas Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sari D. Triana, 2017. Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP Di Kampung Lebak Manis Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5. Nomor 1.
- Setyosari, Punaji. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Jannah, F.Sivia.2016. Efektivitas Program Siaran Radio Suara Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang). *JurnalUnesa*. Volume 4. Nomor 3.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni, Wiratna dan P. Endrayamto. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Statistik Indonesia. *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Statistik Lampung. *Badan Pusat Statistik Lampung*.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Materi Sosialisasi BPNT 2018.
- Wibawa, Samudra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.